



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Sekretariat DPRD Kota Semarang dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Renja ini mutlak diperlukan demi sinergitas dengan dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyusunan Perubahan Renja ini, yaitu Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang juga mengalami beberapa perubahan.

Dokumen ini memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat DPRD dengan disertai dengan indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif. Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi Sekretariat DPRD Kota Semarang untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran sebelum disahkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran guna penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja ini sangat kami harapkan. Demikian dokumen Perubahan Rencana Kerja ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten.

Semarang, Agustus 2025

SEKRETARIS DPRD KOTA SEMARANG



MOCH IMRON, SH., MH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi

KATA PENGANTARii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. LANDASAN HUKUM2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN4

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN
LALU6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD..... 18

2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD21

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG28

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....28

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD.....31

BAB IV REANCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA
SEMARANG33

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Semarang.....33

BAB V PENUTUP 41

5.1. Catatan Penting.....41

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan41

5.3. Rencana Tindak Lanjut41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Perangkat Daerah.....1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG7

Tabel 2. 2 Realisasi Keuangan Sekretariat DPRD Kota Semarang Triwulan II Tahun 202513

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Semarang sampai dengan Tahun 202417

Tabel 2. 4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Semarang22

Tabel 3. 1 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 202532

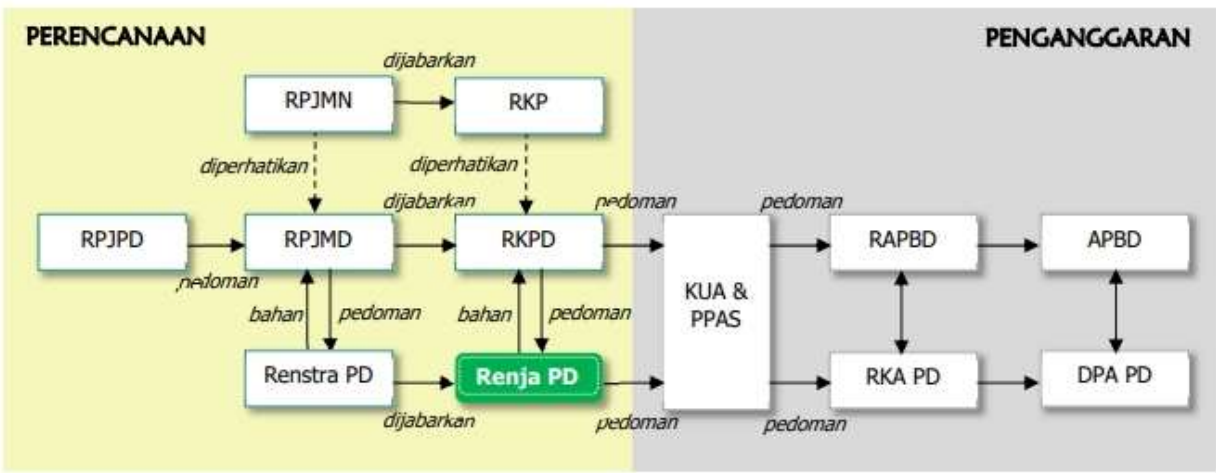
Tabel 4. 1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Semarang.....35

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Perangkat Daerah

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Sekretariat DPRD Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dengan dinamika perencanaan kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Tahun 2024 dan efisiensi Anggaran oleh Pemerintah Pusat maka salah satu implikasi dari hal tersebut adalah perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya termasuk pada Sekretariat DPRD Kota Semarang. Karena itu dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
- p. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
- q. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang;
- s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
- t. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen Perubahan Rencana Kerja tahunan bagi Sekretariat DPRD Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat DPRD; analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD; review terhadap Perubahan RKPD; serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN 2025

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang

Kualitas Renja Perangkat Daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dan juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Sekretariat DPRD sampai tahun 2025 sampai dengan triwulan II, yang menggunakan Renstra Kota Semarang tahun 2021 – 2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021 -2026 sampai dengan Tahun Triwulan II Tahun 2025

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra sd Tw II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja sd Tw II Tahun 2025	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja sd Tw II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD							
4.02.02.2.01	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	Jumlah Raperda yang diusulkan							48,2 %
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Raperda	85 Dokumen	36 Dokumen	16 Dokumen	5 Dokumen	31,25%	41 Dokumen	48.2 %
4.02.02.2.04	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD							80 %
4.02.02.2.04.03	Publikasi Dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	80 %
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok Pakar dan Tim Ahli	90 orang	54 orang	18 Orang	18 Orang	100%	72 orang	80 %
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 dokumen	80 %
4.02.02.2.05	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	Terserapnya Aspirasi Masyarakat							66,6 %
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	750 Dokumen	450 Dokumen	150 Dokumen	50 Dokumen	33,3 %	500 Dokumen	66,6 %
4.02.02.2.08	FASILITASI TUGAS DPRD	Terlaksananya Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD							60 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra sd Tw II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja sd Tw II Tahun 2025	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja sd Tw II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.02.2.08.01	Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dprd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	3 Dokumen	60 %
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan Dprd	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	3 Dokumen	60 %
04.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja							
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan kinerja							
		Persentase peningkatan kemampuan ASN							
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran							
4.02.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan							
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	8 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50 %	8 Dokumen	80 %
		Jumlah Dokumen Renstra	1 dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100 %
4.02.01.2.01.02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	4%	3 Dokumen	6 0%
4.02.01.2.01.03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	80%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra sd Tw II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja sd Tw II Tahun 2025	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja sd Tw II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.01.2.01.04	Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	3 Dokumen	60 %
4.02.01.2.01.05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa-Skpd	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	3 Dokumen	60 %
4.02.01.2.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	3 Dokumen	60 %
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	6 Dokumen	1 dokumen	0 Dokumen	0%	6 Dokumen	60 %
4.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan ASN							100%
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN terbayar	100%	100%	100%	94,96%	94,96%	52 orang	100%
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminsitasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	0 Dokumen	0%	3 Dokumen	60 %
4.02.01.2.02.05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 laporan	3 laporan	1 laporan	0 laporan	0%	3 laporan	60 %
4.02.01.2.02.07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd	Jumlah laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan Semesteran SKPD	60 laporan	36 laporan	12 laporan	6 laporan	50 %	42 laporan	70%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra sd Tw II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja sd Tw II Tahun 2025	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja sd Tw II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Barang Milik Daerah Terlindungi							
4.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 dokumen	12 dokumen	4 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	60%
4.02.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti BinteK Implementasi PerUUan	250 orang	150 orang	50 orang	20 orang	40 %	170 orang	68%
4.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran Sarana & Prasarana Aparatur							
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15 Paket	9 Paket	3 Paket	2 Paket	66%	11 Paket	73,3%
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	35 Paket	21 Paket	7 Paket	3 Paket	42,8%	24 Paket	68,5%
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Peralatan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang tersedia	60 Paket	36 Paket	12 Paket	6 Paket	50%	42 Paket	70%
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	30 Paket	18 Paket	6 Paket	3 Paket	50%	21 paket	70%
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bhn Bacaan dan PerUUan yang disediakan	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 dokumen	0%	3 dokumen	60%
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	6 laporan	50%	42 laporan	70%
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	6 laporan	50%	42 laporan	70%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra sd Tw II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja sd Tw II Tahun 2025	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja sd Tw II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
4.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya							
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	100%	60%	7 Unit	0 Unit	0 %	15 unit	60%
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpenuhi	100%	60%	55 Unit	25 Unit	45,4%	55 Unit	68%
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang disediakan	100%	60%	25 Unit	20 Unit	80%	25 unit	67%
4.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Umum Kantor, Jasa Surat Menyurat, Komunikasi Sumber daya Air & Listrik							
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5 laporan	3 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0%	3 laporan	60%
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi , SDA dan Listrik yang disediakan	60 Laporan	36 Laporan	12 laporan	6 laporan	50%	42 Laporan	70%
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60 Laporan	36 Laporan	12 laporan	6 laporan	50%	42 Laporan	70%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja sd Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra sd Tw II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja sd Tw II Tahun 2025	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja sd Tw II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya							
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	210 Unit	156 Unit	52 Unit	26 Unit	50%	182 unit	86.6 %
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang dipelihara	1240	744 Unit	248 Unit	124 Unit	50%	868 unit	70%
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	4 Unit	80%
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung lkantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	500 Unit	300 Unit	100 Unit	50 Unit	50%	350 unit	70%
4.02.01.2.15	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan DPRD							
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Dprd	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	250 orang	150 orang	50 Orang	50 Orang	100%	200 orang	80%
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Dprd	Jumlah Pakaian Dinas DPRD	30 Paket	18 Paket	6 Paket	3 paket	50%	21 Paket	70%
4.02.01.2.16	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	Cakupan Pelayanan Administrasi DPRD							
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Dprd	Prosentase Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD yang tersedia	38 Paket	36 Paket	1 Paket	0 Paket	0%	36 Paket	94.7%

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan Sekretariat DPRD dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Pergeseran II (Setelah Efisiensi dan Penyesuaian SHS) sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. Data tersebut tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 2 Realisasi Keuangan Sekretariat DPRD Kota Semarang Triwulan II Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Sekretariat DPRD	122.201.317.289	49.646.167.019	40,63%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	77.709.298.524	36.017.427.584	46,35%
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	198.310.318	5.654.500	2,85%
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.087.418	220.000	0,24%
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.561.400	-	0,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.370.900	-	0,00%
7	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.306.900	3.915.000	47,13%
8	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.370.900	-	0,00%
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.731.400	1.409.500	24,59%
10	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	30.881.400	110.000	0,36%
11	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	50.000.000	-	0,00%
12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.674.939.471	4.434.056.527	51,11%
13	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.305.667.440	4.276.936.027	51,49%
14	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	365.452.431	155.796.000	42,63%
15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.685.000	646.000	38,34%
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.134.600	678.500	31,79%
17	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	70.000.000	-	0,00%
18	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	70.000.000	-	0,00%

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
19	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	400.253.050	171.600.000	42,87%
20	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	400.253.050	171.600.000	42,87%
21	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.162.302.355	2.880.871.388	46,75%
22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.000.000	17.726.300	23,64%
23	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	397.327.845	140.757.133	35,43%
24	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	487.389.216	105.993.200	21,75%
25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	440.487.546	150.427.500	34,15%
26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	225.776.400	42.541.000	18,84%
27	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.725.002.640	2.128.400.845	57,14%
28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	811.318.708	295.025.410	36,36%
29	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.245.589.879	619.625.000	14,59%
30	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.916.298.840	-	0,00%
31	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	854.839.453	468.225.000	54,77%
32	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	474.451.586	151.400.000	31,91%
33	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.304.232.211	1.534.657.171	24,34%
34	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.477.693	11.500.000	51,16%
35	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.135.936	20.700.668	20,88%
36	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.182.618.582	1.502.456.503	24,30%
38	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.940.366.878	422.245.061	21,76%
37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	966.300.475	239.648.751	24,80%
39	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	328.313.203	33.104.640	10,08%
40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	403.904.000	113.810.190	28,18%

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
41	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	241.849.200	35.681.480	14,75%
42	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	49.711.504.362	25.948.717.937	52,20%
43	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	48.719.959.000	25.872.662.482	53,10%
44	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	991.545.362	76.055.455	7,67%
45	Layanan Administrasi DPRD	1.800.000	-	0,00%
46	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.800.000	-	0,00%
47	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	44.492.018.765	13.628.739.435	30,63%
48	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	14.427.487.880	5.839.247.826	40,47%
49	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	14.427.487.880	5.839.247.826	40,47%
50	Peningkatan Kapasitas DPRD	6.828.247.924	1.150.684.780	16,85%
51	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.137.275.184	143.165.000	12,59%
52	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3.073.577.440	720.664.780	23,45%
53	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2.617.395.300	286.855.000	10,96%
54	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	7.031.289.886	2.229.380.242	31,71%
55	Pelaksanaan Reses	7.031.289.886	2.229.380.242	31,71%
56	Fasilitasi Tugas DPRD	16.204.993.075	4.409.426.587	27,21%
57	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12.578.837.160	4.042.744.587	32,14%
58	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3.626.155.915	366.682.000	10,11%
	Jumlah	122.201.317.289	49.646.167.019	40,63%

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada APBD Tahun 2025, aspek dukungan dana yang digunakan untuk membiayai 2 program dan 14 kegiatan serta 41 Sub kegiatan pada Sekretariat DPRD adalah sebesar Rp 122.201.317.289. Dengan realisasi anggaran sampai triwulan II ini sebesar Rp49.646.167.019 atau setara 40.63% . Beberapa aspek yang mempengaruhi

capaian Realisasi anggaran Sekretariat DPRD pada triwulan II ini adalah Efisiensi terhadap beberapa rekening seperti Perjalanan Dinas dan Pengadaan Modal. Selain itu terdapat penyesuaian Standar Harga Satuan sesuai dengan Surat Edaran Pj. Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor B/1487/900.1/IV/2025 tanggal 21 April 2025 tentang Penyesuaian Standar Harga Satuan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD adalah melaksanakan fungsi sebagai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang.

Sampai dengan triwulan II Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Semarang telah memfasilitasi kegiatan DPRD dalam menetapkan keputusan DPRD, diantaranya adalah :

1. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/4 Tahun 2025 tanggal 5 Mei 2025 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/4 Tahun 2025 tanggal 5 Mei 2025 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rancangan Pembangunan Industri Kota
3. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/4 Tahun 2025 tanggal 5 Mei 2025 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyertaan Modal
4. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/4 Tahun 2025 tanggal 5 Mei 2025 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Nomenklatur PT BPR Bank Pasar
5. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/7 Tahun 2025 tanggal 4 Juni 2025 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Perda Kota Semarang No 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Beberapa Rancangan Peraturan Daerah yang masih dalam proses pembahasan diantaranya adalah :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tata kelola Badan Usaha Milik Daerah;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Sampah;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang penanganan Tuberkulosis (TBC) di Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Semarang sampai dengan Tahun 2024

Tujuan / Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi				Proyeksi
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025 TW II	2025
Tujuan										
Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Semarang	Presentase Pembentukan Perda dan Pengawasan Pelaksanaan Perda	85%	90%	91%	93,5%	84.83%	87.51 %	77,6 %	-	87%
Sasaran										
Meningkatnya kapasitas dan kualitas kinerja DPRD	Persentase Raperda menjadi Perda	76.47 %	82.35 %	83,3 %	84 %	53.3%	62.50 %	62.5 0%	31,2 5%	75%
Meningkatnya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP OPD	79.94	80	80,5	81	73.86	77,15	79,1 0	-	80,20

Adapun hasil analisis dari pencapaian Target dan Sasaran Sekretariat DPRD Tahun 2024 tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan “Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Semarang” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Presentase Pembentukan Perda dan Pengawasan Pelaksanaan Perda”. Dari Target yang ditentukan sebesar 91, Sekretariat DPRD dapat terrealisasikan sebesar 77,6%;
- b. Terdapat 2 Sasaran yang ditetapkan
 - 1) “Meningkatnya kapasitas dan kualitas kinerja DPRD” memiliki 1 indikator kinerja Persentase Raperda menjadi Perda
 - 2) “Meningkatnya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD” memiliki 1 indikator kinerja Nilai SAKIP OPD.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Semarang tidak terlepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis baik di Lingkup internal DPRD Kota Semarang maupun dampak dari Keputusan Partai Politik di tingkat Nasional. Tahun 2025 merupakan peralihan kepemimpinan Kepala Daerah di Kota Semarang. Kepala Daerah hasil pemilihan serentak telah menjalankan tugasnya sehingga diperlukan akselerasi dalam pemenuhan janji politik saat kampanye.

Dampak dari Instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran juga menjadi perhatian DPRD Kota Semarang. Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran, DPRD Kota Semarang turut mengawal perubahan RKPD hingga menjadi RAPBD Kota Semarang tahun 2025. Sinergi yang baik dalam tata kelola pemerintahan ini tentunya akan dirasakan oleh masyarakat sehingga pembangunan di Kota Semarang dapat tetap berjalan dengan baik.

Peran Sekretariat DPRD dalam memberikan layanan kepada Anggota Dewan dituntut secara profesional, tetap netral dan maksimal. Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang saat ini adalah melaksanakan fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administarsi keuangan dan mendukung pelaksanaan tugas ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi kesekretariatan, administrasi keuangan, dan mendukung pelaksanaan tugas ahli diantaranya :

1. Rencana Kerja DPRD

Rencana Kerja DPRD disusun secara partisipatif melalui kegiatan Workshop Renja DPRD yang melibatkan seluruh anggota dan perangkat pendukung. Workshop ini bertujuan untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan DPRD yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah

kebijakan pembangunan daerah. Seiring waktu, efisiensi anggaran menjadi perhatian utama menyusul arahan Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan tersebut mendorong optimalisasi belanja negara dengan mengutamakan hasil yang efektif dan efisien. Pemerintah Kota Semarang melalui Edaran Pj. Sekretaris Daerah Kota Semarang melakukan penyesuaian Standar Harga Satuan (SHS) yang berdampak pada pengurangan uang harian perjalanan dinas dan pagu biaya penginapan. Penyesuaian ini diharapkan tidak mengurangi kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, tetapi justru meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Dengan demikian, Rencana Kerja DPRD tetap dapat berjalan optimal, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat..

2. Tidak tercapainya Target Raperda menjadi Perda

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 memutuskan sebanyak 16 Raperda yang akan ditetapkan dalam kurun waktu 2024. Namun sampai dengan akhir tahun sidang hanya 10 Raperda yang berhasil ditetapkan persetujuannya oleh DPRD bersama Pemerintah Kota Semarang. Capaian ini apabila dilihat dari tahun sebelumnya memperoleh hasil yang sama yakni 10 Raperda yang ditetapkan. Raperda belum dapat mencapai target 16 Raperda yang direncanakan hal ini disebabkan karena kurangnya kesiapan materi dari pengusul dan adanya perubahan per Undang-undangan dari tingkat pusat, di samping itu padatnya kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang.

Inovasi yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi diantaranya :

1. Pemanfaatan sosial media dalam penyebaran informasi DPRD Kota Semarang

Secara rutin DPRD Kota Semarang menyapa masyarakat lewat media cetak, media online, radio, dan televisi . Dalam beberapa kesempatan tersebut, DPRD Kota Semarang mengangkat issue yang sedang hangat di masyarakat. Misalnya permasalahan Pendidikan, Kesehatan dan Pemahaman terhadap fungsi Legislatif. Ini merupakan salah satu bagian dari bentuk tanggung jawab DPRD Kota Semarang dalam melaporkan hasil kerjanya kepada masyarakat.

Media sosial juga digunakan DPRD Kota Semarang untuk berinteraksi dengan masyarakat. Penggunaan media sosial Instagram, dan Youtube sangat populer dikalangan generasi milenial. Lewat berbagai media sosial tersebut, DPRD Kota Semarang bisa menjangkau kalangan generasi milenial yang juga menjadi bagian dari konstituen mereka.

Masyarakat juga bisa menyampaikan kegiatan DPRD Kota Semarang lewat TV Parlemen D-TV. Agenda kegiatan DPRD, termasuk rapat-rapat, disarankan secara live streaming lewat akun Youtube DPRD Kota Semarang. Lewat inovasi ini, masyarakat bisa menyaksikan dan mengawasi secara langsung kinerja wakil-wakil mereka di parlemen.

2. JDIH Sekretariat DPRD

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Dalam laman ini memuat informasi terkait dengan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Peraturan DPRD yang dapat diakses pada alamat <https://jdih.dprd.semarangkota.go.id>

Pada bulan Juli Tahun 2024, Sekretariat DPRD Kota Semarang pada tahun 2024 ini memperoleh penghargaan sebagai Terbaik Kedua Tingkat Jawa Tengah dalam Lomba Pengelolaan JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum) yang diserahkan langsung oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purn Drs. Nana Sudjana, A.S didampingi oleh Kepala Pusat JDIHN Kementerian Hukum dan HAM RI, Jonny P. Simamora kepada Sekretaris DPRD Kota Semarang Moch Imron, S.H., M.H.

3. Dhayoh-e

Dhayoh-e merupakan Aplikasi yang dibuat Sebagai Media Komunikasi Digital DPRD Kota Semarang dengan DPRD Kabupaten / Kota Dan Instansi pemerintah Se Indonesia. Tentunya hal ini memudahkan dalam mengatur dan mengetahui kehadiran tamu yang akan berkunjung ke DPRD Kota Semarang secara sistematis. Link dapat diakses pada tautan berikut <https://etamudprd.semarangkota.go.id/buku-tamu/public/reservasi>

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang khususnya di tahun 2025 mendatang :

a) Tantangan

- 1) Tahun 2025 merupakan tahun pertama pengabdian secara penuh bagi Anggota DPRD yang terpilih dalam pemilihan 2024. Tentunya program-program dan janji-janji politik dalam kampanye berusaha untuk direalisasikan. Hal ini tentunya diperlukan harmonisasi antara Eksekutif dan Legislatif untuk pelaksanaannya.
- 2) Pemenuhan janji politik Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan serentak Tahun 2024 juga akan dilaksanakan pada tahun 2025. Hal ini tentunya

diperlukan harmonisasi antara Eksekutif dan Legislatif untuk dalam pelaksanaan janji-janji politik Kepala Daerah.

- 3) Perkembangan Kota Semarang sebagai salah satu Kota Besar di Indonesia tentunya harus diikuti dengan regulasi-regulasi yang mendukung iklim investasi sehingga memudahkan calon investor untuk menanamkan modalnya di Kota Semarang
- 4) Mengembalikan tingkat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan dampak dari kasus korupsi dilingkungan Pemerintah Kota Semarang menjadi tugas bersama antara Eksekutif dan Legislatif

b) Peluang

- 1) Periode baru 2024-2029 diharapkan membawa semangat baru bagi DPRD Kota Semarang dalam mewakili masyarakat dalam menyuarakan aspirasi masyarakat;
- 2) Pengoptimalan fungsi JDIH Sekretariat DPRD Kota Semarang. Terdokumentasikannya peraturan-peraturan yang sistematis dan lengkap merupakan salah satu indikator tercapainya pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD Kota Semarang. Sehingga harapannya adalah JDIH Sekretariat DPRD Kota Semarang mendapat penghargaan dalam pengelolaan JDIH tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional
- 3) Mendorong partisipasi publik melalui forum dengar pendapat, reses interaktif, dan kanal aspirasi digital untuk membangun kepercayaan serta kedekatan dengan masyarakat;
- 4) Meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang berpihak pada kepentingan publik, berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, dan responsif terhadap permasalahan aktual di Kota Semarang.
- 5) Memperluas kerja sama dengan lembaga pengawas eksternal dan media guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kredibilitas DPRD di mata masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Sekretariat DPRD. Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini

Tabel 2. 4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Semarang

REKENING	Rancangan Perubahan RKPD 2025				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
04.02	SEKRETARIAT DPRD			118.746.066.977				118.746.066.977
04.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD	100%	70.680.649.532	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD	100%	70.680.649.532
		Persentase Kinerja administrasi dan pealporan keuangan Sekretariat DPRD	100%	-		Persentase Kinerja administrasi dan pealporan keuangan Sekretariat DPRD	100%	-
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD	100%	-		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD	100%	-
		persentase peningkatan kemampuan ASN Sekretariat DPRD	100%	-		persentase peningkatan kemampuan ASN Sekretariat DPRD	100%	-
4.02.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	12 Bulan	117.091.701	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	12 Bulan	117.091.701
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	31.018.801	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja & Renstra tersusun	2 dokumen	31.018.801
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	4.561.400	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	Jumlah Dokumen RKA tersusun	1 dokumen	4.561.400
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	4.370.900	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd	Jumlah Dokumen Perubahan RKA tersusun	1 dokumen	4.370.900

REKENING	Rancangan Perubahan RKPD 2025				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	8.306.900	Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd	Jumlah Dokumen DPA tersusun	1 dokumen	8.306.900
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa-Skpd	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	4.370.900	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa-Skpd	Jumlah Dokumen Perubahan DPA tersusun	1 dokumen	4.370.900
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	5.731.400	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 dokumen	5.731.400
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	8.731.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Lakip yang tersusun	1 dokumen	8.731.400
4.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000		Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000
4.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan ASN	100%	8.712.705.649	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan ASN	100%	8.712.705.649
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN terbayar	49 orang/ bulan	8.370.575.618	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN terbayar	49 orang/ bulan	8.370.575.618
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminisitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	338.310.431	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	persentase terpenuhinya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	338.310.431
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1.685.000	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Laporan	1.685.000

REKENING	Rancangan Perubahan RKPD 2025				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd	Jumlah laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan Semesteran SKPD	6 Laporan	2.134.600	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	6 Laporan	2.134.600
4.02.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Barang Milik Daerah Terlindungi	100%	2.000.000	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase dokumen administrasi Pengamanan BMD	100%	2.000.000
4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7 dokumen	2.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd	Jumlah Dokumen kontrak pengamanan Barang Milik Daerah	1 dokumen	2.000.000
4.02.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50 orang	500.103.050	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50 orang	500.103.050
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti BinteK Implementasi PerUUan	50 orang	500.103.050	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti BinteK Implementasi PerUUan	50 orang	500.103.050
4.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran Sarana & Prasarana Aparatur	100%	6.155.366.686	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran Sarana & Prasarana Aparatur	100%	6.155.366.686
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3 Paket	75.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3 Paket	75.000.000
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	7 Paket	351.494.200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	7 Paket	351.494.200
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Peralatan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	12 Paket	287.389.216	Penyediaan Peralatan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	12 Paket	287.389.216
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Paket	388.161.279	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Paket	388.161.279
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bhn Bacaan dan PerUUan yang disediakan	1 Dokumen	145.070.000	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bhn Bacaan dan PerUUan yang disediakan	1 Dokumen	145.070.000

REKENING	Rancangan Perubahan RKPD 2025				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.913.246.923	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.913.246.923
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	995.005.068	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	995.005.068
4.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100%	639.932.282	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100%	639.932.282
4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	7 Unit	450.001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	0 Unit	450.001
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpenuhi	55 Unit	478.653.715	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpenuhi	55 Unit	478.653.715
4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang disediakan	25 Unit	160.828.566	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang disediakan	25 Unit	160.828.566
4.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Umum Kantor, Jasa Surat Menyurat, Komunikasi Sumber daya Air & Listrik	12 bulan	3.332.789.349	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Umum Kantor, Jasa Surat Menyurat, Komunikasi Sumber daya Air & Listrik	12 bulan	3.332.789.349
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	22.477.693	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	22.477.693
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi , SDA dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	80.698.354	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi , SDA dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	80.698.354
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	3.229.613.302	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	3.229.613.302
4.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100%	1.557.862.785	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100%	1.557.862.785

REKENING	Rancangan Perubahan RKPD 2025				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	52 Unit	883.095.115	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	52 Unit	883.095.115
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang dipelihara	248 Unit	153.176.403	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang dipelihara	248 Unit	153.176.403
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	403.904.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	403.904.000
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung lkantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	117.687.267	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung lkantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	117.687.267
4.02.01.2.15	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan DPRD	100%	49.660.998.030	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan DPRD	100%	49.660.998.030
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Dprd	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang/bulan	48.719.959.000	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Dprd	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang/bulan	48.719.959.000
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Dprd	Jumlah Pakaian Dinas DPRD	6 Paket	941.039.030	Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Dprd	Jumlah Pakaian Dinas DPRD	6 Paket	941.039.030
4.02.01.2.16	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	Cakupan Pelayanan Administrasi DPRD	100%	1.800.000	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	Cakupan Pelayanan Administrasi DPRD	100%	1.800.000
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Dprd	Prosentase Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD yang tersedia	100%	1.800.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Dprd	Prosentase Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD yang tersedia	100%	1.800.000
04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	18 dokumen	48.065.417.466	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	18 dokumen	48.065.417.466
4.02.03.2.01	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	Jumlah Raperda yang diusulkan	19 Perda	15.870.658.360	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	Jumlah Raperda yang diusulkan	19 Perda	15.870.658.360

REKENING	Rancangan Perubahan RKPD 2025				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.03.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Raperda	17 Dokumen	15.870.658.360	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Raperda	17 Dokumen	15.870.658.360
4.02.02.2.04	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	7.011.319.824	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	7.011.319.824
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok Pakar dan Tim Ahli	20 Orang	3.103.577.440	Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok Pakar dan Tim Ahli	20 Orang	3.103.577.440
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah orang dalam kelompok Pakar dan Tim Ahli	12 Dokumen	2.675.575.300	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah orang dalam kelompok Pakar dan Tim Ahli	12 Dokumen	2.675.575.300
4.02.02.2.04.0008	Publikasi Dan Dokumentasi Dprd	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	6 Dokumen	1.232.167.084	Publikasi Dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat - Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	6 Dokumen	1.232.167.084
4.02.02.2.05	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	Terseapnya Aspirasi Masyarakat	100%	7.714.200.498	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	Terseapnya Aspirasi Masyarakat	100%	7.714.200.498
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	50 dokumen	7.714.200.498	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	50 dokumen	7.714.200.498
4.02.02.2.08	FASILITASI TUGAS DPRD	Terlaksananya Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100%	17.469.238.764	FASILITASI TUGAS DPRD	Terlaksananya Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100%	17.469.238.764
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dprd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	14.475.047.557	Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dprd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	14.475.047.557
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan Dprd	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	2.994.191.207	Fasilitasi Tugas Pimpinan Dprd	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	2.994.191.207

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah “Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

Delapan Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56

5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar $2,5 \pm 1\%$;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;
- Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

- Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;
- Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;
- Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;
- Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;
- Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaraan event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin

6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang merupakan pelaksanaan dari Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD yang kemudian menjadi tujuan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025, adalah :

“Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD dalam mendukung Kinerja DPRD”

Dalam rangka untuk mencapai tujuan , maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut adalah

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja DPRD dengan indikator berupa Persentase Raperda menjadi Perda

2. Meningkatnya penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dengan indikator Nilai SAKIP Sekretariat DPRD

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3. 1Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Semarang	Presentase Pembentukan Perda dan Pengawasan Pelaksanaan Perda	%	93.50%
SASARAN :			
Meningkatnya kapasitas dan kualitas kinerja DPRD	Persentase Raperda menjadi Perda	%	84%
Meningkatnya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	81

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Semarang

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Sekretariat DPRD memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota Semarang.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Perubahan Renja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025 sebanyak 2 (dua) program yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah/ eks rutin), dan 1 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025 sebanyak 14 (empat belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub

kegiatan yang terdiri dari terdiri dari 34 (tiga puluh tiga) sub kegiatan rutin dan 7 (tujuh) sub kegiatan pembangunan.

3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 sebesar Rp 118.746.066.977 (Seratus Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tuju Rupiah).

Adapun rencana dan kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4. 1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Semarang

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			APBD TA 2025	Pergeseran II	Perubahan Renja 2025	APBD TA 2025	Pergeseran II	Perubahan Renja 2025		
4.02	SEKRETARIAT DPRD					140.938.973.172	122.201.317.289	118.746.066.977		
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	79.681.037.967	77.709.298.524	70.680.649.532		
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertib penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	200.685.318	198.310.318	117.091.701		
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	92.462.418	90.087.418	31.018.801	PAD	
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.561.400	4.561.400	4.561.400	PAD	
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.370.900	4.370.900	4.370.900	PAD	
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.306.900	8.306.900	8.306.900	PAD	
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.370.900	4.370.900	4.370.900	PAD	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			APBD TA 2025	Pergeseran II	Perubahan Renja 2025	APBD TA 2025	Pergeseran II	Perubahan Renja 2025		
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.731.400	5.731.400	5.731.400	PAD	
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	30.881.400	30.881.400	8.731.400	PAD	
4.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	PAD	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib penyusunan dokumen administrasi keuangan	100%	100%	100%	8.674.939.471	8.674.939.471	8.712.705.649		
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	50	50	8.305.667.440	8.305.667.440	8.370.575.618	PAD, DTU-DAU	
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	365.452.431	365.452.431	338.310.431	PAD	
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.685.000	1.685.000	1.685.000	PAD	
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	2.134.600	2.134.600	2.134.600	PAD	
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah terlindungi	8 buah	8 buah	8 buah	70.000.000	70.000.000	2.000.000		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			APBD TA 2025	Pergeseran II	Perubahan Renja 2025	APBD TA 2025	Pergeseran II	Perubahan Renja 2025		
4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	70.000.000	70.000.000	2.000.000	PAD	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	50 orang	50 orang	50 orang	816.053.050	400.253.050	500.103.050		
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	50 Orang	816.053.050	400.253.050	500.103.050	PAD	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	7.601.390.369	6.162.302.355	6.155.366.686		
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	75.000.000	75.000.000	75.000.000	PAD	
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	397.327.845	397.327.845	351.494.200	PAD	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	487.389.216	487.389.216	287.389.216	PAD	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	440.487.546	440.487.546	388.161.279	PAD	
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	225.776.400	225.776.400	145.070.000	PAD	
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.725.002.640	3.725.002.640	3.913.246.923	PAD	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.250.406.722	811.318.708	995.005.068	PAD	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			APBD TA 2025	Pergeseran II	Perubahan Renja 2025	APBD TA 2025	Pergeseran II	Perubahan Renja 2025		
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	4.245.589.879	4.245.589.879	639.932.282		
4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	0 Unit	0 Unit	2.916.298.840	2.916.298.840	450.001	PAD	
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	55 Unit	55 Unit	854.839.453	854.839.453	478.653.715	PAD	
4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	25 Unit	25 Unit	474.451.586	474.451.586	160.828.566	PAD	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6.304.232.211	6.304.232.211	3.332.789.349		
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	22.477.693	22.477.693	22.477.693	PAD	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	99.135.936	99.135.936	80.698.354	PAD	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6.182.618.582	6.182.618.582	3.229.613.302	PAD	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	2.054.843.307	1.940.366.878	1.557.862.785		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			APBD TA 2025	Pergeseran II	Perubahan Renja 2025	APBD TA 2025	Pergeseran II	Perubahan Renja 2025		
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	52 Unit	52 Unit	1.080.776.904	966.300.475	883.095.115	PAD	
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	248 Unit	248 Unit	248 Unit	328.313.203	328.313.203	153.176.403	PAD	
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	403.904.000	403.904.000	403.904.000	PAD	
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	100 Unit	100 Unit	241.849.200	241.849.200	117.687.267	PAD	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tertib penyusunan dokumen administrasi keuangan DPRD	100%	100%	100%	49.711.504.362	49.711.504.362	49.660.998.030		
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50	50	50	48.719.959.000	48.719.959.000	48.719.959.000	PAD	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	991.545.362	991.545.362	941.039.030	PAD	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Cakupan pelayanan administrasi DPRD	100%	100%	100%	1.800.000	1.800.000	1.800.000		
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	1.800.000	1.800.000	1.800.000	PAD	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	18.00	18.00	18.00	61.257.935.205	44.492.018.765	48.065.417.466		
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Raperda yang diusulkan	18 Perda	18 Perda	18 Perda	15.381.426.880	14.427.487.880	15.870.658.360	PAD	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			APBD TA 2025	Pergeseran II	Perubahan Renja 2025	APBD TA 2025	Pergeseran II	Perubahan Renja 2025		
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	15.381.426.880	14.427.487.880	15.870.658.360	PAD	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD	100%	100%	100%	7.329.762.924	6.828.247.924	7.011.319.824		
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20 Orang	20 Orang	20 Orang	1.166.675.184	1.137.275.184	3.103.577.440	PAD	
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.487.512.440	3.073.577.440	2.675.575.300	PAD	
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	2.675.575.300	2.617.395.300	1.232.167.084	PAD	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terserapnya aspirasi masyarakat	100%	100%	100%	7.528.819.486	7.031.289.886	7.714.200.498		
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	7.528.819.486	7.031.289.886	7.714.200.498	PAD	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	100%	100%	100%	31.017.925.915	16.204.993.075	17.469.238.764		
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	27.391.770.000	12.578.837.160	14.475.047.557	PAD	
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.626.155.915	3.626.155.915	2.994.191.207	PAD	

BAB V

PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

5.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD ini berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan output/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis OPD;
3. Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dan Keputusan DPRD Kota Semarang dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Sekretariat DPRD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan sebagai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kota Semarang tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA Perubahan nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta Evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Semarang akan dilaksanakan secara bersinergi dan berkesinambungan dalam mendukung

- program - program pemerintah daerah perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara DPRD dengan OPD di Kota Semarang agar kegiatan dapat terlaksana dengan optimal;
2. Memacu percepatan pembahasan Raperda, baik kepada Pansus maupun kepada Eksekutif untuk secepatnya mengirim naskah Raperda untuk dibahas.
 3. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
 4. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
 5. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025

Dengan disusunnya Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan, konsistensi dan keberlanjutan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan di Kota Semarang. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

Semarang, Agustus 2025
SEKRETARIS DPRD KOTA SEMARANG

MOCH IMRON, SH, MH.